

## ABSTRAK

Pembangunan di Indonesia selama ini telah mencapai hasil yang mendekati perencanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwasanya Anggaran Daerah yang tertuang dalam APBD berpedoman pada RKPD, dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan harus melalui musrenbang partisipatif. Proses perencanaan di Kabupaten Gunungkidul mengedepankan musrenbang partisipatif, walaupun selama ini sulit mewujudkan konsistensi, dan permasalahan pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Tesis ini meneliti tentang konsistensi hasil musrenbang pada RKPD, sampai APBD guna mengetahui keberhasilan perencanaan penganggaran bidang fisik dan prasarana tahun anggaran 2013-2015 di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi.

Penelitian ini dilakukan pada 3 SKPD yang mengampu bidang fisik dan prasarana. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dimana dalam pengumpulan data, informasi, melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan yang terkait dengan perencanaan mulai proses musrenbang, RKPD, sampai APBD. Observasi peneliti dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dalam pengambilan data yang relevan dengan permasalahan peneliti, adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, dan teknik analisis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan peneliti dengan sumber data baik data primer melalui orang kunci.

Tingkat konsistensi selama tiga tahun dari tahun 2013, 2014, tahun 2015 pada bidang fisik dan prasarana SKPD DPU menunjukkan ada peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar 77%, tahun 2014 sebesar 82%, dan 96% tahun 2015. Tingkat konsistensi pada SKPD Dishubkominfo tahun 2013 sampai tahun 2015 semakin membaik ini ditunjukkan tahun 2013 sebesar 83%, tahun 2014 sebesar 88%, dan tahun 2015 sebesar 94%. Tingkat konsistensi pada SKPD Kapedal dari tahun 2013 sampai tahun 2015 semakin membaik ini ditunjukkan pada tahun 2013 sebesar 88%, tahun 2014 sebesar 88%, tahun 2015 sebesar 100%.

Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah yang terjabarkan dalam RKPD, KUA, dan APBD Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2015 bidang fisik dan prasarana pada SKPD DPU, Dishubkominfo, dan Kapedal selama tiga tahun cenderung naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi adalah Pemahaman antara SKPD, TAPD; adanya kebijakan pusat; adanya hasil evaluasi RAPBD oleh Gubernur; dan terwadahnya pokok-pokok pikiran DPRD kedalam program kegiatan SKPD.

*Kata kunci : Pembangunan, Perencanaan, Penganggaran, Konsistensi.*

## ABSTRACT

Development in Indonesia during the last decade has been improved significantly in term of the consistency between the planning document and implementations. It may be said that almost all of the development plans, as it is documented in annual development planning handbook, are well implemented. Based on the Indonesian Law of Financial No 17/2003, it is stated that Local Budgetary Planning (APBD) has to be articulated in the Local Government Program Plan (RKPD). According to the Law Number 25/2004 of National System of Development Plan, the development planning process should involve public and stake holders or better known as participatory planning through the “Musrenbang” mechanism. Development planning process in Kabupaten Gunungkidul, one of the districts under the Provincial Government of Yogyakarta, has been implemented this kind of participatory planning. Due to the imbalance development among sub districts in Gunungkidul, it is difficult for the local government to continue the development process based on the participatory planning mechanism. This thesis examines how many programs proposed in Musrenbang are covered in the document of RKPD, financially supported in the budgetary planning (APBD), and implemented in development programs, especially infrastructure programs during the year of 2013-2015.

Qualitative approach is used in this research in order to measure the successful implementations of infrastructure programs conducted in 3 SKPD. Data used in this research are collected from primary data, case study, interview, and site visits. While conducting the research, samples are taken with the techniques of non probability sampling and purposive sampling. Triangulation analysis techniques are used to test the validity of data taken from primary data and interview with key people.

The data shows that during the year of 2013-2015, in the SKPD of DPU there were increasing number of consistency between the planning documents and implementations of infrastructures planning programs. In 2013 the level of consistency is 77 %, 82% in the year of 2014, and 96% in the year of 2015. The same pattern also happens in Dishubkominfo and Kapedal. In Dishubkominfo in 2013 the level of consistency is 83%, 88% in 2014 and 94% in 2015. Whereas in Kapedal the increasing level of consistency is as follow: 88% in the year of 2013 and 2014 and 100% in the year of 2015.

The research shows that in those three SKPD, there are increasing number of consistency between the planning documents (RKPD, KUA, APBD) and implementations in the year of 2013, 2014, and 2015. Factors that stimulate the increasing number of consistency are: mutual understanding among SKPDs and the budgetary team (TAPD), central government’s policy, the Governor evaluation on the RKPD of Kabupaten Gunungkidul, and the aspiration of the DPRD that are accommodated in the planning documents.

*Key words: development, planning, budgeting, consistency.*